

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Ali Mahrus. *Hukum Pidana Korupsi Di Indonesia*. Yogyakarta: UII Press, 2011.
- Baharuddin Loppa. *Perundang-undangan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Bandung: Alumni, 1990.
- Barda dan Muladi Nawawi. *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni, 1998.
- C.S.T Kansil. *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1989.
- Henry Arianto. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Esa Unggul, 2012.
- Hermien Hadiati Koeswadji. *Korupsi Di Indonesia Dari Delik Jabatan Ke Tindak Pidana Korupsi*. Cetakan Ke-1, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1994.
- I. G. M Nurdjana. *Korupsi Dalam Praktik Bisnis*. Jakarta: PT.Gramedia, 2005.
- J.E Lokollo. *Perkembangan Pidana Denda di Indonesia (Disertasi)*. Surabaya: Universitas Air Langga. Fakultas Hukum, 1998.
- J.E Sahetapy. *Parados Dalam Kriminologi*. Edisi 1, Cetakan ke-2, Jakarta: Rajawali Press, 1989.
- L. Herbert Packer. *The Limits of the Criminal Sanction*. Stanford California: Stanford University Press, 1968.
- Nomensen Sinamo. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: PT. Bumi Intitama Sejahtera, 2011.
- Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2005.
- Roeslan Saleh. *Hukum Pidana Sebagai Konfrontasi Manusia dan Manusia*. Jakarta, 1983.
- Soedjono. *Fungsi Perundang-Undangan Pidana Dalam Penanggulangan Korupsi Di Indonesia*. Bandung: Sinar Baru, 1984.

Sudarto. *Hukum Dan Hukum Pidana*. Jakarta: Erlangga, 1980.

Surachmin dan Suhandi Cahaya. *Strategi dan Teknik Korupsi (mengetahui untuk mencegah)*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

Syed Hussein Al Atas. *Korupsi, Sifat Sebab Dan Fungsi*, terj. Nirwono. Cetakan Pertama, Jakarta: Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES), 1987.

Valerine J.L Kriekhof. *Penelitian Kepustakaan dan Lapangan Dalam penulisan Skripsi (Pedoman Penulisan Skripsi Bidang Hukum)*. UPT Penerbitan Universitas Tarumanegara, 1996.

Van Bemmelen. *Hukum Pidana I Hukum Pidana Material Bagian Umum*. Cet. Ke-1, Bandung: Binacipta, 1984.

Wirjono Prodjodikoro. *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*. Bandung: PT. Eresco, 1986.

B. Peraturan Perundang-undangan

_____. *Peraturan Pemerintah No.28 tahun 2006 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan*.

_____. *Peraturan Pemerintah No.99 Tahun 2012 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan*.

_____. *Keputusan Presiden Nomor 174 th 1999 tentang Remisi*.

_____. *Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: PAS.247.OT.03.01-Tahun 2012 tentang Pemberian Remisi Umum Pada Hari Kemerdekaan RI Tahun 2012 Kepada Narapidana dan Anak Pidana*.

_____. *Keputusan Menteri Nomor M.09.HN.02.01 tahun 1999 tentang pelaksanaan kepres No.174 thn 1999 tentang remisi*.

_____. *Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-01.PK.02.02 tahun 2010 tentang Remisi Susulan*.

C. Internet

Banyak yang Salah Kaprah, Remisi Bukan Bagian dari HAM, (On-Line) tersedia di <http://www.lensaindonesia.com/2012/03/10/banyak-yang-salah-kaprah-remisi-bukan-bagian-dari-ham.html>, (10 Maret 2013).

Fatwa MUI: Haram Grasi/ Remisi Koruptor, (On-Line), tersedia di <http://regional.kompasiana.com/2010/08/25/mui-mengeluarkan-fatwa-haram-grasi-kepada-koruptor-237848.html>. (19 Maret 2013).

Kebijakan Hukum Pidana Mengenai Syarat Pemberian Remisi Kepada Narapidana Tindak Pidana Korupsi, (On-Line), tersedia di [http://www.lawskripsi.com/index.php?option=com_content&view=article &id=323temid%3D323&Itemid=](http://www.lawskripsi.com/index.php?option=com_content&view=article&id=323temid%3D323&Itemid=)(24 Februari 2013).

Prosedur Pemberian Remisi, (On-Line), tersedia di <http://cabrutsinabang.blogspot.com/2012/02/>. (16 Maret 2013).

Remisi Itu Hadiah, Bukan HAM, (On-Line) tersedia di [http://www.politikindonesia.com /index. php?k=pendapat&i=32047-Remisi%20Itu%20Hadiah, %20Bukan%20 HAM](http://www.politikindonesia.com/index.php?k=pendapat&i=32047-Remisi%20Itu%20Hadiah,%20Bukan%20HAM), (15 Maret 2013).

Semboyan Hukum, (On-Line), tersedia di [http://hukum.kompasiana.com /2011/12/13/ semboyan-hukum-421586.html](http://hukum.kompasiana.com/2011/12/13/semboyan-hukum-421586.html), (27 Desember 2012).